



## Aset Kabupaten Pemekaran Tak Beres

**PONTIANAK** - Pemekaran tiga kabupaten di Kalbar, yakni Singkawang, Bengkayang, dan Sambas menimbulkan persoalan aset yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kepala Subauditorat Kalbar 1 BPK RI, Patrice Lumumba Sihombing mengatakan jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, dapat berpengaruh terhadap

memberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. "Persoalan yang terjadi di Kalbar adalah aset. Di Kalbar, aset erat hubungannya dengan pemekaran," ungkap Patrice seusai Media Workshop BPK RI Provinsi Kalbar, Selasa (4/11) di Hotel Mercure Pontianak. Menurut Patrice, dalam pemekaran yang terjadi, pencata-

tan aset administrasi kabupaten induk dengan kabupaten baru belum tertib. Saat ini yang menjadi pembicaraan adalah pemekaran daerah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas (Singbebas). Pemekaran terjadi sejak lama, tetapi persoalan asetnya belum beres hingga sekarang.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

## Aset Kabupaten Pemekaran Tak Beres

*sambungan dari halaman 16*

Patrice mengungkapkan kendala penyelesaian aset daerah Singbebas itu dikarenakan saling tidak mau menyerahkan aset. Apalagi ada aset yang banyak memberikan manfaat kepada mereka seperti gedung dan pasar.

"Pasar memberikan pendapatan sehingga saling mengaku. Peraturannya sudah jelas, minimal dua tahun setelah pemekaran harus diserahkan asetnya," kata Patrice.

Kepala Subauditorat Kalbar 1 BPK RI, Joni Rindra Putra mengatakan selain Singbebas, persoalan aset juga terjadi pada Kabupaten Kubu Raya, yang mekar dari Kabupaten Mempawah.

Hanya saja, persoalan aset Kubu Raya hampir selesai. "Mudah-mudahan tahun depan (oponi) hasil pemeriksaan tahun depan ada perbaikan karena tidak banyak lagi permasalahan aset. Tetapi ini tergantung mereka (Pemkab Kubu Raya)," ungkap Joni, kemarin.

Begitu pula pemekaran Kayong Utara dan Ketapang, persoalan aset hampir selesai. Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan persoalan aset di sana tidak material lagi. "Karena memang dalam melakukan pemeriksaan ada batasannya. Tidak serta merta semua dikatakan masalah," katanya.

Joni menambahkan persoalan aset terjadi karena tidak adanya pencatatan administrasi yang jelas, sep-

erti lokasi, jumlah, maupun luasnya. Hal ini menjadi kesulitan BPK RI untuk mengetahuinya. Tetapi hal ini bukan dikarenakan pemda sendiri, melainkan juga ada keterkaitan dengan lembaga lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional.

"Untuk aset pemprov sendiri, hampir semua bisa diselesaikan makanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," ujarnya.

Selain Pemprov Kalbar, lanjutnya, Landak, Kota Pontianak, Sintang, dan Sekadau juga mendapat opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2013. Sedangkan kabupaten kota lainnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. (uni)